

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM KAMTIBMAS

Oleh: Kuncara Yuniadi

Di balik hingar bingar gemerlapnya kota metropolis dengan segala nuansanya, menyimpan potensi beragam permasalahan kompleks sekaligus krusial. Kota-kota besar selain sebagai sentra-sentra pemerintahan, pusat pertokoan, perkantoran, perdagangan, dan lain-lain keperluan birokratis yang memungkinkan relasi antarmanusia dalam melancarkan berbagai keperluan rutin juga menyimpan berjuta permasalahan yang tidak mudah untuk diadakan deteksi dan tindakan secara dini. Karakteristik etalase wajah kota-kota besar di dunia memiliki masing-masing pesona tersendiri.

Di samping indah dan menarik, parameter lain yang menjadi penilaian instingtif bagi para pengunjung segera setelah menginjakkan kakinya di sebuah kota adalah terpenuhinya kebutuhan jaminan rasa aman. Konon, menghabiskan waktu hingga malam hari di East Coast Seafood Centre di Singapura, atau di Piazza Navona di Roma, atau di kawasan Opera Bastille di Paris, atau kawasan teater di Leicester Square di London, beberapa dari sekian banyak contoh, orang merasa selalu aman-aman saja.

Berbeda suasana kota yang memberi kepastian rasa aman dan kenyamanan tempat tinggal bagi penduduk setempat, setiap kali kita mendengar kota-kota besar tertentu, bayangan tanpa sadar kita akan menerawang pada fenomena tindak kejahatan yang bisa menimpa siapa saja. Di kawasan Bronx New York misalnya, perjalanan kita akan dicekam rasa was-was dan ketakutan karena memang kota ini amat dikenal dengan tingkat

kriminalitasnya yang semakin eskalatif dan menggunung.

Kota Tokyo yang semula dikenal sebagai kota yang cukup aman, sebagai fakta lain, kini memendam beribu kekhawatiran setelah pecahnya aksi Sekte Aum Shinnikyo yang sempat menebar racun di kereta bawah tanah. Di samping tentunya kota-kota besar lainnya, yang juga amat dikenal dengan seriusitas dan tingkat kriminalitasnya.

Bagaimana dengan kota-kota besar khususnya di Ibu Kota? Di Jakarta, beberapa waktu lalu oleh beberapa media massa cetak maupun elektronik dilaporkan, bahwa aksi pemerasan dan kejahatan premanisme cenderung mengganas. Di sejumlah pasar, persimpangan jalan, dan tempat-tempat rawan lainnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tak pernah sepi dari berita-berita aksi tindakan kekerasan. Bahkan aktivitas sekelompok preman ini malah telah berubah menjadi pelaku kejahatan terorganisasi, dengan modus operandi yang makin bervariasi.

Mulai dari pura-pura menubrukkan tubuhnya pada kendaraan yang sedang melintas. Begitu pengemudi berhenti segera diperas. Modus lainnya adalah menghentikan kendaraan sasaran. Beberapa orang berwajah keras kemudian mengklaim kendaraannya telah diserempet dengan berbagai intimidasi korban bisa diperas sampai jutaan rupiah. Modus dengan mengelap kaca kendaraan yang sedang berhenti di persimpangan atau lampu sedang menyala merah, yang dilakukan oleh para tunawisma, dengan memaksa uang

dengan jumlah tertentu. Jika tak diberi, atau tak sesuai dengan yang dikehendaki, langsung membaretkan paku ke mobil pengemudi, pemerasan kepada pengemudi yang bannya Kempes akibat ranjau paku yang disebar atau sengaja "ditanam" ketika lalu lintas sedang sepi (malam hari) adalah varian modus operandi yang muncul akhir-akhir ini.

Belum lagi di sejumlah pasar juga menunjukkan, para penjahat memeras para pedagang tanpa ampun dengan cara membarengi sanksi dan kekerasan fisik kepada pedagang yang membandel. Mereka beroperasi bahkan melebihi seorang petugas resmi.

Di sektor angkutan, para pengemudi angkutan umum dan truk setiap hari jadi obyek pemerasan. Mereka yang hidupnya pas-pasan ini harus menyetor beberapa ribu rupiah kepada anak-anak muda yang mangkal di beberapa tempat. Sedang dalam pola yang paling canggih, pelaku kriminal ini berkecimpung sebagai penagih utang (debt collector) dan centeng para pengembang kawasan (developer) untuk menakut-nakuti rakyat agar melepaskan tanahnya dengan harga serendah mungkin.

Pembaca pun melalui surat pembaca atau telepon juga tak ketinggalan dalam menambah 'semarak' fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat, baik karena pengalaman yang mereka lihat, saksikan bahkan alami sendiri.

Berbagai penyakit sosial di atas memang tak berarti langsung mengindikasikan bahwa kejahatan makin meningkat dan masyarakat semakin resah. Sebab, selain data statistik yang presisi dan akurat, juga diperlukan semacam tolok ukur dari keresahan itu sejauh mana warga masyarakat dapat dikatakan resah? Namun juga tak dapat disangkal bahwa seiring dengan perkembangan jaman dengan berbagai perubahan sosial maupun ekonomi, common sense masyarakat mengisyaratkan bukan tidak mungkin mengunggulnya tindakan menyalah itu potensial akan mengembangbiakkan rasa kekhawatiran, kalaulah tak boleh dibilang ketakutan, dan rasa aman di tengah hiruk-pikuk kehidupan di perkotaan.

Jika gejala itu kita anggap sebagai perkembangan, tentunya merupakan perkembangan yang memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan. Kita prihatin, potensi perkembangan dalam konteks itu bersifat negatif-destruktif, dan kita pun juga khawatir karena bila tidak diantisipasi dan memerlukan penanganan lebih lanjut dampaknya akan sangat meresahkan warga masyarakat dan cenderung memberi kesan akan terkikisnya rasa aman pada kejahatan (fear of crime). Guna menekan tindak kejahatan di Ibu Kota khususnya, aparat keamanan setempat cukup responsif dengan cara menerapkan kawasan bebas tindak kejahatan secara terpadu. Di kawasan terpadu di tempat-tempat tertentu dan secara perlahan akan semakin melebar itu sebagai salah satu upaya menciptakan iklim yang kondusif, yang pada intinya akan mencegah tindak kejahatan atau pelanggaran yang dapat mengganggu Kamtibmas sekecil apapun.

Bukti yang paling dekat, dalam tempo kurang dari sepekan, ribuan orang sudah terjaring Operasi Kilat Jaya Emas pada beberapa kawasan rawan kejahatan di Ibu Kota itu. Mereka yang pada awalnya diduga berpotensi menimbulkan kerawanan tindak kriminalitas, pada saat pemeriksaan berikutnya ternyata tak kurang dari setengah jumlah itu, sudah pasti akan diproses secara hukum karena antara lain, terbukti membawa senjata tajam, tak memiliki KTP atau tanda pengenal lainnya, KTP yang kedaluarsa, parkir liar, perjudian, tersangka pencurian, mucikari, WTS, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan sebagainya.

Berdasarkan data kepolisian, dengan operasi ini angka kriminalitas pun menunjukkan penurunan. Yakni, pada semester I tahun 1995 (April-September) dari 70 jenis kejahatan, tercatat 10.996 kasus. Pada semester sebelumnya tercatat 12.990-, sehingga terdapat penurunan sebesar 2.024 kasus. Demikian pula dengan PPGK (peristiwa penting gangguan keamanan) yang terdiri 17 kasus, jika semester lalu tercatat 4.140, pada semester terakhir tercatat hanya 3.621 kasus. Sehingga terdapat penurunan 519 kasus.

Mengenai kejahatan utama yang menonjol, yakni anirat (penganiayaan berat), curas (pencurian dengan kekerasan), curat (pencurian dengan pemberatan) serta curanmor (pencurian kendaraan bermotor) juga terdapat penurunan. Dari 7.790 kasus pada semester lalu, pada semester terakhir tercatat 5.993 kasus. Jadi terdapat penurunan 857 kasus.

Kendati secara umum mengindikasikan menurun, tak dapat disangkal ada gejala peningkatan kualitas dan pantas mendapat perhatian semua pihak terutama masyarakat sebagai muara paling akhir pihak yang akan merasakan dampak eskalativitas kriminalitas. Trend kejahatan yang makin eskalatif, kita sependapat keadaan semacam ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Perlu dicari latar belakang penyebab, pemicunya serta pemecahannya.

Keamanan sebuah kota sedikit banyak memang dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial ekonomi. Manakala muncul ketegangan yang mengandung kedua faktor di atas, keamanan kota pun menjadi korbannya. Jika terus berlanjut dan berkembangnya rasa tidak aman di kalangan masyarakat dapat membuat kota kehilangan dinamika dan aura hidupnya. Warga akan membatasi kegiatannya mulai dari yang paling mendasar sampai kebutuhan nonprimer dan lambat laun kota akan jauh dari suasana hidup dan senantiasa mencekam.

Di sisi lain, masyarakat terus mengalami perubahan yang cukup intensif dan simultan. Bahwa daya tarik kota sebagai pusat kegiatan pemerintahan, administrasi, ekonomi sosial, begitu kuat. Urbanisasi tak pernah kendur bahkan lajunya tetap tinggi. Demikian pula lapangan kerja menjadi masalah yang tak pernah surut. Kesenjangan berkali-kali menjadi pusat perhatian. Belum lagi persoalan tempat tinggal, persoalan penggusuran, masalah kendor norma dan kontrol sosial masyarakat.

Pada waktu yang sama, tak dapat dihindari kesan yang sangat paradoks. Masyarakat dalam kondisi yang bertalian mengalami tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di satu sisi, di sisi lain perasaan tidak puas, perasaan kecewa, perasaan tertinggal dan merasa diperlakukan secara tidak adil dan diperlakukan

sebagai warga kelas dua dengan menganggangi prinsip persamaan derajat di depan hukum (equality before the law), misalnya; juga semakin bertambah.

Berbagai cara untuk mengatasinya telah ditempuh berbagai pihak baik dalam konsep maupun melalui program-program konkrit. Sebagai hasilnya, yang berupa terciptanya rasa aman pada masyarakat memang masih relatif, artinya, tak selalu sinergis atau semudah dengan perolehan data-data yang dari segi statistik memang memuaskan. Satu menyangkut perhitungan matematis, satunya lagi menyangkut rasa berupa keamanan yang langsung dirasakan dalam meniti kehidupan. Dua kondisi kenyataan hidup yang bisa jadi sulit bertemu dan dipertemukan.

Pada titik ini, masyarakat warga (civil society) dalam konteks sebagai aktor utama penciptaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sendiri sebagai penentu paling akhir terhadap penciptaan Kamtibmas yang bersifat swakarsa itulah yang harus dikembangkan agar masyarakat mampu mandiri mengenali jati diri sekaligus menangkis fenomena sosial yang kurang harmonis dan kondusif bagi penciptaan ketenangan dan kedamaian di tengah kehidupan.

Ke mana arah pemecahan harus dicari? Mengusahakan, mendekatkan, bahkan mengakumulasikan suatu sinergi yang mencakup antara kondisi subyek katakanlah sebagai pelaku pembangunan yang terbina dalam hubungan simbiostis mutualistik.

Membuat setiap level lembaga dan sistem berfungsi secara lebih efektif dan optimal sehingga memperkuat wibawa dan kredibilitasnya disertai tentunya pemberdayaan masyarakat, lembaga dan berbagai organisasinya. Aparat Babinkamtibmas (bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) hendaknya lebih menggairahkan pengamanaan swakarsa masyarakat. Karena keterbatasan personil aparat Kamtibmas dan keamanan, maka seharusnya yang menjadi ujung tombak anti kejahatan di kota-kota adalah masyarakat sendiri, yang tentunya bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya.

Tanggung jawab bersama, masyarakat, aparat, pemerintah adalah sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan yang timbul mengenai tanggung jawab siapakah keamanan dan rasa aman, yang merupakan bagian integral dari gerak usaha kemajuan dan perbaikan kehidupan. Inilah proses yang harus kita tempuh sebagai ongkos sosial (social cost) dari pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi jalan apa pun yang ditempuh, tidak bisa mendatangkan kepuasan dan kemakmuran secara merata. Peran pengambil keputusan sangat dinantikan sentuhan kebijakannya dalam meratakan kue pembangunan sekaligus meminimalisasi jurang perbedaan sosial-ekonomi yang bisa berdampak pada maraknya tindakan kriminalitas. Juga perlu ditingkatkan bagaimana memacu secara kreatif sesuai dengan orde ancaman dan tantangan, pemahaman serta pelaksanaan perihal Kamtibmas.

Kamtibmas yang dimaksud, adalah yang mewadahi lingkungan komunitas penghuninya. Bagaimana mengembangkan konsep Kamtibmas dalam lingkungan tempat tinggal, lingkungan jalan raya, maupun lingkungan kerja. Pendeknya, setiap warga dan masyarakat harus mengetahui dan memahami dalam kondisi dan situasi bagaimana mereka tinggal, dalam lingkungan apa dan bagaimana mereka berada, lantas atas dasar pengetahuan itu berusaha mengambil peran, menyesuaikan pola dan gaya hidup serta perilaku dan berantisipasi.

Terciptanya keamanan dan rasa aman masyarakat dan warga masyarakat telah inklusif menjadi isi, dimensi, nuansa dan warna pengejawantahan paham ketahanan nasional (national resilience). Bukankah terciptanya keamanan dan rasa aman sama hakikinya dengan perbaikan ekonomi, serta tidak kalah hakikinya dengan hak demokrasi atau hak asasi?

Penulis adalah Perwira Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.